



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2025, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Lampiran II Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025.

KESATU : Lampiran II dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR : 161 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2025

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
1	Audit								
1.1	Survei pendahuluan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (TIK SPBE)	Pusat Data dan Informasi	5	40	1	April	November	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Audit Internal TIK SPBE"
1.2	Audit Kinerja pada Sasaran Program 1 Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	0	0	0	April	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena hanya dilakukan Audit Ketaatan pada Gugus Tugas Keuangan dan Anggaran
1.3	Audit Kinerja pada Sasaran Program 2 Meningkatnya jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	0	0	0	September	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena jumlah peningkatan PDN dan UMKK melebihi target.
1.4	Survei Pendahuluan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Atas Efektivitas Penayangan Produk Pada Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) Tahun Anggaran 2014-2015 Pada Lembaga	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	40	1	Juni	Oktober	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah								berjudul "Audit Kinerja pada Sasaran Program 3 Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ "
1.5	Survei Pendahuluan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Atas Transaksi E-Purchasing Pada Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2019-2020	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	40	1	Juni	Oktober	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul " Audit Kinerja pada Sasaran Program 7 Meningkatnya Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan"
1.6	Audit Ketaatan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	40	1	Juni	Juni	Laporan	
	JUMLAH KEGIATAN AUDIT			160	4				
2	Reviu								
2.1	Reviu atas Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	0	0	0	April	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena tidak ada permintaan reviu dari Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	0	0	0	Mei	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena penetapan proses pagu Indikatif Tahun 2026 oleh DJA Kemenkeu terlalu singkat dan sifatnya opsional

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.3	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	30	1	Juli	Juli	Laporan	
2.4	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	5	15	1	September	September	Laporan	
2.5	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027	Biro HUBungan Masyarakat dan Umum	4	10	1	Oktober	Oktober	Laporan	
2.6	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri LKPP Tahun 2024	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	5	20	1	Januari	Januari	Laporan	
2.7	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	3	20	1	Februari	Februari	Laporan	
2.8	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0	0	Februari	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena Pada 2025 terkait Reviu PAPBJ terdapat perubahan mekanisme Reviu PAPBJ oleh BPKP
2.9	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0	0	Juni	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena Pada 2025 terkait Reviu PAPBJ terdapat perubahan mekanisme Reviu PAPBJ oleh BPKP
2.10	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0	0	September	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena Pada 2025 terkait Reviu PAPBJ terdapat perubahan mekanisme Reviu PAPBJ oleh BPKP
2.11	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0	0	Desember	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena Pada 2025 terkait Reviu PAPBJ terdapat perubahan mekanisme Reviu PAPBJ oleh BPKP

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.12	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2024 (Unaudited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	6	30	1	Januari	Januari	Laporan	
2.13	Reviu atas Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	4	15	1	April	April	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2024 (Audited)"
2.14	Reviu atas Laporan Keuangan LKPP Semester I Tahun Anggaran 2025	Sekretariat Utama	6	30	1	Juli	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Semester I Tahun Anggaran 2025"
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Sekretariat Utama	6	20	1	Oktober	Oktober	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024"
2.16	Reviu atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	10	1	Februari	Februaru	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.17	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	6	20	1	Januari	Januari	Laporan	
2.18	Reviu atas Transaksi Pembelian melalui E-Purchasing pada Produk dengan Kontrak Tayang Telah Berakhir dan Tidak Sesuai dengan Harga pada SK Penetapan Tahun 2016-2017	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	20	1	Maret	November	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul dan jenis pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Audit Kinerja pada Sasaran Program 6 Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ"
	JUMLAH KEGIATAN REVIU			240	12				
3	Evaluasi								
3.1	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan IV Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Januari	Januari	Laporan	
3.2	Evaluasi Internal atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General Tahap Perencanaan (Ex-Ante) di Lingkungan LKPP Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Februari	Juni	Laporan	
3.3	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	April	Juni	Laporan	
3.4	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Juli	Juni	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
3.5	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Oktober	Oktober	Laporan	
3.6	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	4	30	1	Juli	Juli	Laporan	
3.7	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	30	1	Juni	Juni	Laporan	
3.8	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	30	1	Mei	Mei	Laporan	
3.9	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja	4	30	1	Agustus	Agustus	Laporan	
3.10	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat Utama	4	30	1	Juni	Juni	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
3.11	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Data dan Informasi	3	30	1	Agustus	Agustus	Laporan	
3.12	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	3	30	1	Juli	Juli	Laporan	
3.13	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Inspektorat	3	30	1	Mei	Mei	Laporan	
3.14	Evaluasi atas Usulan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	April	April	Laporan	
3.15	Evaluasi atas Desain dan Penerapan Manajemen Risiko Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0	0	Agustus	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
	JUMLAH KEGIATAN EVALUASI			310	14				
4	Pemantauan								
4.1	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Juli	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.2	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Desember	Desember	Laporan	
4.3	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Maret	April	Laporan	
4.4	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juni	Juni	Laporan	
4.5	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	September	September	Laporan	
4.6	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Desember	Desember	Laporan	
4.7	Pemantauan atas Tindak Lanjut Audit Keamanan SPBE	Pusat Data dan Informasi	3	5	1	Maret	Maret	Laporan	
4.8	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Januari	Januari	Laporan	
4.9	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	April	Arpil	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.10	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Juli	Laporan	
4.11	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	
4.12	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Januari	Januari	Laporan	
4.13	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	April	April	Laporan	
4.14	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Juli	Juli	Laporan	
4.15	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.16	Pemantauan atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKAN Pejabat/Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	April	April	Laporan	
4.17	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Januari	Januari	Laporan	
4.18	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Juli	Juli	Laporan	
4.19	Pemantauan atas Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester II Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Januari	Januari	Laporan	
4.20	Pemantauan atas Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Juli	Juli	Laporan	
4.21	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B24 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	5	1	Januari	Januari	Laporan	

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.22	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Maret	Maret	Laporan	
4.23	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B03 Tahun 2025 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Maret	Oktober	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan III Tahun 2025"
	JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN			135	23				
5	Konsultansi								
5.1	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	60	1	Februari	Februari	Laporan	
5.2	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	0	0	0	Maret	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.3	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II termasuk MR SPBE pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	0	0	0	Mei	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
5.4	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	0	0	0	April	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.5	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	0	0	0	Mei	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.6	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Sekretariat Utama	Sekretariat Utama	0	0	0	Maret	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.7	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II termasuk MR SPBE pada Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi	0	0	0	Mei	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.8	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	Mei	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
5.9	Pendampingan Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Risiko	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	30	1	Januari	Januari	Undangan Rapat	
5.10	Fasilitasi atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023	Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	20	1	Oktober	Oktober	Notulensi	
5.11	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	20	1	April	April	Laporan	
	JUMLAH KEGIATAN KONSULTANSI			130	4				

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
6	Peningkatan Kapabilitas APIP								
6.1	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Inspektorat	6	20	1	Mei	Mei	Laporan	
6.2	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	April	April	Laporan	
6.3	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan II Tahun 2025	Inspektorat	3	10	1	Juli	Juli	Laporan	
6.4	Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan III Tahun 2025	Inspektorat	0	0	0	Oktober	-	Laporan	Penugasan ditiadakan karena bukti dukung sudah lengkap pada TW II
6.5	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B06 Tahun 2025 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	10	1	Desember	Oktober	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul " Pemantauan atas Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025
	JUMLAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP			50	4				

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
7	Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern								
7.1	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT A	Inspektorat	4	20	1	Februari	Februari	Laporan	
7.2	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT B	Inspektorat	4	20	1	Maret	Maret	Laporan	
7.3	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2024 pada GT C	Inspektorat	4	20	1	Februari	Februari	Laporan	
7.4	Penilaian Mandiri atas Telaah Sejawat Eksternal	Inspektorat	3	20	1	September	September	Laporan	
	JUMLAH KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN HASIL PENGAWASAN INTERN			80	4				
8	Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern								
8.1	Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP	Inspektorat	6	20	1	Februari	Februari	Rancangan Pedoman	
	JUMLAH KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERN			20	1				
9	Perencanaan Pengawasan Intern								

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Semester I)	Keluaran	Keterangan Perubahan
9.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2026	Inspektorat	4	20	1	November	November	Rancangan PKPT	
9.2	Penyusunan Peta Risiko Tingkat UPR I dan II di Inspektorat	Inspektorat	0	0	0	Maret	-	Rancangan Peta Risiko Inspektorat	Penugasan ditiadakan karena Belum terdapat pedoman teknis oleh Komite Manajemen Risiko LKPP
	JUMLAH KEGIATAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN			20	1				
	JUMLAH KESELURUHAN			1145	67				

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA